

KRITIK NETIZEN TERHADAP OTORITAS KYAI DALAM LIPUTAN TRANS7: ANALISIS WACANA TIKTOK

Abdurrahman Afif¹, Ahmad Ridwan², Refti Handini³,
Fransiscus Xaverius Sri Sadewo⁴

Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

Email: 24040564097@mhs.unesa.ac.id¹, ahmadridwan@unesa.ac.id², ReftiHandini@unesa.ac.id³,
fsadewo@unesa.ac.id⁴,

Abstract

This study examines the virality of criticism of the authority of Islamic scholars (kyai) in a Trans7 report widely discussed on TikTok, and how power and gender relations in the context of Islamic boarding schools (pesantren) are reproduced and negotiated through digital discourse. Drawing on Michel Foucault's theory of power relations, this study aims to understand how religious authority is constructed, maintained, and questioned through public interactions on social media. The study uses a qualitative approach with Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis method, with data consisting of one TikTok video containing the report and four purposively selected netizen comments as the primary units of analysis. The results show that netizen criticism functions as a counter-discourse that challenges the traditional construction of Islamic boarding school (kyai) authority, particularly on issues of abuse of power, lack of accountability in Islamic boarding schools (pesantren) institutions, and gender inequality. The virality of TikTok plays a significant role in expanding the reach of criticism, creating a participatory space that allows the public to intervene in religious narratives previously dominated by Islamic boarding school authorities. These findings confirm that the digital space has shifted the relationship between Islamic boarding school (kyai) and santri and opened up new mechanisms for the public to evaluate religious practices. This research contributes to the sociology of religion by demonstrating that power relations are no longer static but are continually negotiated through digital discourse. The implications of these findings emphasize the importance of careful production and regulation of religious content on social media, as well as the need to develop a more contextual analytical framework to understand the dynamics of power relations in Indonesian Islamic society.

Keywords: *Kyai Authority, Power Relations, Discourse Analysis, TikTok*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena viralisasi kritik terhadap otoritas kyai dalam liputan Trans7 yang ramai diperbincangkan di TikTok, serta bagaimana relasi kuasa dan gender dalam konteks pesantren direproduksi dan dinegosiasikan melalui wacana digital. Berangkat dari teori relasi kuasa Michel Foucault, penelitian ini bertujuan memahami bagaimana otoritas keagamaan dibangun, dipertahankan, dan dipertanyakan melalui interaksi publik di media sosial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*) Norman Fairclough, dengan data berupa satu video TikTok yang memuat liputan tersebut serta empat komentar netizen yang dipilih secara purposif sebagai unit analisis utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kritik netizen berfungsi sebagai wacana tantangan yang menantang konstruksi tradisional otoritas kyai, terutama dalam isu penyalahgunaan kuasa, kurangnya akuntabilitas institusi pesantren dan ketimpangan gender. Viralitas TikTok memainkan peran penting dalam memperluas jangkauan kritik, menciptakan ruang partisipatif yang memungkinkan publik mengintervensi narasi keagamaan yang sebelumnya didominasi otoritas pesantren. Temuan ini menegaskan bahwa ruang digital telah menggeser hubungan kyai santri dan membuka mekanisme baru bagi masyarakat untuk mengevaluasi praktik keagamaan. Penelitian ini berkontribusi pada kajian sosiologi agama dengan menunjukkan bahwa relasi kuasa tidak lagi bersifat statis, melainkan terus dinegosiasikan melalui wacana digital. Implikasi temuan ini menekankan pentingnya berhati-hati dalam produksi dan regulasi konten keagamaan di media sosial, serta perlunya pengembangan kerangka analisis yang lebih kontekstual untuk memahami dinamika relasi kuasa dalam masyarakat Islam Indonesia.

Kata Kunci: *Otoritas Kyai, Relasi Kuasa, Analisis Wacana, Tiktok*

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki peran penting dalam pembentukan moral, spiritual, dan sosial masyarakat. Dalam tradisi pesantren, kyai memegang posisi yang sangat sentral, baik sebagai pemimpin spiritual, pengambil kebijakan, maupun figur panutan yang dihormati tanpa batas (Fanani, 2022). Struktur sosial pesantren cenderung hierarkis, di mana kyai berada di puncak otoritas yang hampir tidak dapat digugat oleh santri maupun pengurus. Legitimasi otoritas ini bersumber dari kharisma, pengetahuan agama, dan budaya *ta'dzim* atau penghormatan mutlak terhadap guru. Namun, struktur kekuasaan yang tertutup tersebut sering kali menciptakan relasi kuasa yang timpang dan membuka potensi penyalahgunaan otoritas, terutama dalam konteks hubungan antara kyai dan santri perempuan (Winarno et al., 2025).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan pesantren merupakan persoalan sosial yang berakar pada ketimpangan kekuasaan dan struktur patriarki yang kuat. Ketika kepatuhan itu dijalankan secara tidak proporsional, muncul mekanisme dominasi dan pembungkaman yang menormalisasi kekuasaan tersebut. Kondisi ini diperparah dengan budaya diam dan stigma sosial terhadap korban, yang menyebabkan kekerasan seksual di pesantren sulit terungkap dan sering disembunyikan atas nama menjaga nama baik lembaga (Nurmayani et al., 2025).

Selain persoalan kekuasaan, isu gender juga memainkan peran penting dalam menciptakan ketimpangan sosial di lingkungan pesantren. tafsir kitab kuning klasik yang diajarkan di banyak pesantren masih sarat dengan nilai patriarki, sehingga peran perempuan dibatasi pada ranah domestik dan subordinatif terhadap laki-laki (Jauhari & Thowaf, 2019). Penelitian lain bahkan menemukan bahwa dalam banyak kasus kekerasan berbasis gender, relasi patron-klien antara kyai dan santri perempuan menjadikan korban tidak berdaya secara sosial maupun spiritual (Pebriaisyah et al., 2022). Situasi ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender dan penyalahgunaan otoritas di pesantren bukan sekadar persoalan individu, tetapi merupakan masalah struktural yang telah berakar dalam sistem keagamaan dan budaya patriarki pesantren itu sendiri.

Dalam perkembangan sosial kontemporer, kehadiran media digital membawa perubahan besar terhadap cara masyarakat menilai dan merespons otoritas keagamaan. Fenomena ini menandai munculnya era “otoritas digital”, di mana media sosial menjadi

arena baru bagi penyebaran, kritik, dan reinterpretasi wacana keagamaan (Alfani & Anwar, 2024). Fenomena ini disebut sebagai bentuk *mediatization of religion*, yaitu pergeseran otoritas dari figur religius tradisional seperti kyai ke figur-figur baru yang membangun pengaruh melalui algoritma dan popularitas (Kiptiyah, 2017). Dalam konteks ini, masyarakat tidak lagi pasif terhadap otoritas agama, melainkan aktif memproduksi wacana dan melakukan kritik terhadap praktik keagamaan yang dianggap menyimpang. Fenomena *kyai selebriti* dan ustaz viral menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi ruang dakwah, tetapi juga arena negosiasi dan resistensi terhadap otoritas lama. Dengan demikian, munculnya kritik netizen terhadap figur kyai di platform seperti TikTok dapat dipahami sebagai bagian dari perubahan struktur otoritas keagamaan di era digital.

Di era digital, media sosial seperti TikTok menjadi ruang utama bagi masyarakat untuk mengungkapkan pendapat, kritik, dan membangun diskusi publik, termasuk dalam ranah keagamaan. Salah satu fenomena yang ramai adalah kritik terhadap otoritas kyai dalam liputan Trans7 mengenai relasi kuasa dan gender di lingkungan pesantren. Liputan tersebut memicu perdebatan luas di kalangan netizen, yang kemudian memproduksi beragam wacana terkait legitimasi otoritas kyai, ketimpangan gender serta praktik keagamaan yang dinilai menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Pesantren tidak hanya dipahami sebagai institusi pendidikan islam tradisional melainkan juga sebagai arena di mana relasi kuasa dan gender direproduksi dan diperdebatkan. Viralitas kritik di TikTok menunjukkan adanya pergeseran cara masyarakat memaknai moralitas, keadilan sosial, dan otoritas keagamaan, di mana publik mulai menegosiasikan batas antara penghormatan dan kritik terhadap kyai (Fanani, 2022). Melalui analisis wacana netizen TikTok, dapat dilihat bagaimana publik memaknai ulang relasi kuasa dan gender di pesantren sekaligus menegosiasikan batas antara penghormatan dan kritik terhadap otoritas keagamaan. Penelitian ini menjadi penting karena mencerminkan transformasi sosial dalam hubungan antara agama, media, dan masyarakat, di mana kyai yang dulu menjadi simbol otoritas absolut kini menjadi subjek kritik publik yang viral di ruang digital.

Meskipun banyak penelitian yang sudah membahas mengenai otoritas agama dalam ruang digital serta dinamika komunikasi di media sosial, studi-studi ini umumnya lebih terfokus pada platform umum seperti Twitter atau YouTube. Penelitian tersebut

belum secara khusus menganalisis hubungan antara media televisi dan tanggapan netizen di TikTok. Selain itu, penerapan perspektif relasi kekuasaan menurut Michel Foucault dalam menyelidiki kritik terhadap otoritas kyai di lingkungan pesantren juga masih terbatas. Namun, belum ada penelitian yang menganalisis wacana netizen TikTok terhadap otoritas kyai dalam liputan media televisi yang viral dengan menggunakan kerangka relasi kuasa Foucault. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana wacana digital membentuk kembali hubungan.

Penelitian ini menggunakan Teori Relasi Kuasa dari Michel Foucault sebagai landasan teoretis utama. Teori ini digunakan untuk melihat wacana sebagai arena produksi dan negosiasi kekuasaan dalam ruang digital. Foucault memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak dimiliki, melainkan beredar dan bekerja melalui jaringan relasi sosial, wacana, dan pengetahuan (Foucault, 1975). Dalam pandangan Foucault, kekuasaan tidak selalu bersifat represif, tetapi juga produktif karena menghasilkan norma, disiplin, dan kebenaran yang diakui dalam masyarakat. Dalam konteks pesantren, otoritas kyai dapat dipahami sebagai bentuk kekuasaan yang lahir dari penguasaan pengetahuan agama, yang kemudian digunakan untuk membentuk perilaku dan pandangan santri (Fanani, 2022).

Konsep penting dalam teori Foucault adalah *power/knowledge*, yaitu keterikatan antara kekuasaan dan pengetahuan. Kyai memiliki otoritas bukan hanya karena kedudukan sosialnya, tetapi karena ia dianggap sebagai sumber kebenaran religius. Wacana keagamaan yang diciptakan oleh kyai seperti ajaran tentang ketaatan, barokah, dan adab kepada guru menjadi alat untuk menanamkan kepatuhan sosial (Dewi & Hakim, 2025). Foucault juga memperkenalkan istilah *regime of truth*, yaitu sistem sosial yang menentukan kebenaran mana yang sah dan mana yang tidak. Dalam pesantren, rezim kebenaran ini dikuasai oleh kyai, sementara suara perempuan dan santri sering kali dipinggirkan (Jauhari & Thowaf, 2019).

Teori relasi kuasa juga menjelaskan bahwa di mana ada kekuasaan, di situ ada perlawanan. Media sosial seperti TikTok kini menjadi arena baru bagi publik untuk membangun wacana tandingan (*counter-discourse*) terhadap dominasi keagamaan (Alfani & Anwar, 2024). Melalui teori ini, penelitian ini akan menganalisis bagaimana netizen TikTok menggunakan bahasa, simbol, dan narasi untuk menantang

otoritas kyai dan membuka ruang kritik atas isu relasi kuasa serta gender di pesantren. Teori relasi kuasa Foucault digunakan karena dapat memahami kekuasaan tidak sekadar sebagai milik individu tertentu, melainkan sebagai praktik wacana dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini dianggap lebih relevan dibandingkan perspektif lain seperti Pierre Bourdieu yang menekankan struktur sosial, atau Jurgen Habermas yang berfokus pada rasionalitas komunikasi. Hal ini dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika kekuasaan yang dinamis dan dihasilkan melalui interaksi digital di media sosial. Dengan demikian, teori Foucault memungkinkan penelitian ini untuk memahami viralisasi kritik bukan sekadar sebagai ekspresi kebebasan, melainkan sebagai proses sosial pembentukan pengetahuan dan pergeseran kekuasaan religius di era digital. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah pada penelitian adalah: bagaimana wacana netizen TikTok mereproduksi, menantang, dan menegosiasikan otoritas kyai dalam liputan Trans7 melalui relasi kuasa?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis/CDA) model Norman Fairclough untuk mengkaji bagaimana bahasa digunakan oleh netizen dalam membangun, menegosiasikan, dan menentang otoritas kyai di ruang digital (Fairclough, 1995). Model Fairclough menekankan tiga dimensi analisis, yaitu teks, praktik wacana, dan praktik sosial, yang memungkinkan peneliti memahami keterkaitan antara produksi bahasa, distribusi makna, dan konteks sosial yang melingkupinya. Model Fairclough sejalan dengan perspektif relasi kuasa Michel Foucault yang memandang bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan sebagai praktik sosial yang sarat dengan kuasa dan ideologi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemaknaan simbol, serta konstruksi sosial yang muncul dalam komentar dan narasi netizen di media sosial. Melalui kerangka ini, peneliti berupaya mengungkap bagaimana representasi otoritas keagamaan, kuasa media, serta praktik resistensi diproduksi, direproduksi, dan diperdebatkan dalam interaksi digital.

Dalam penelitian ini, konsep relasi kekuasaan yang dikemukakan oleh Michel Foucault diterapkan melalui beberapa kategori analisis. Pertama, konsep *power/knowledge* dianalisis dengan mengidentifikasi cara netizen mereproduksi atau menantang pengetahuan yang dianggap benar terkait otoritas kyai dan praktik pesantren. Kedua, *regime of truth* yang digunakan untuk mengamati pola wacana yang dominan,

yaitu pernyataan-pernyataan yang menguatkan legitimasi otoritas kyai sebagai kebenaran yang diterima secara umum. Indikatornya meliputi bahasa norma, rujukan pada nilai-nilai agama, serta pembelaan terhadap struktur otoritas tradisional. Ketiga, *counter-discourse* diidentifikasi melalui komentar yang mengkritik, menolak, atau mendekonstruksi wacana dominan tersebut, misalnya dengan menyoroti ketidakadilan gender, penyalahgunaan kekuasaan, atau ketidaksesuaian praktik dengan nilai keadilan. Melalui pembagian kategori ini, analisis diarahkan pada pemahaman bagaimana wacana netizen tidak hanya merefleksikan, tetapi juga memproduksi dan menegosiasikan relasi kekuasaan di ruang digital (Foucault, 1975).

Lokasi penelitian bersifat virtual dengan platform TikTok sebagai sumber data utama. Platform ini dipilih karena karakteristiknya yang mampu membentuk opini publik melalui algoritma, video pendek, dan kolom komentar yang sangat aktif. TikTok juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, dukungan, maupun interpretasi terhadap isu keagamaan dan gender, termasuk perbincangan mengenai kyai dan pesantren. Data penelitian difokuskan pada satu konten video TikTok yang memuat liputan Trans7 terkait relasi kuasa dan gender di pesantren, yang diakses pada periode Desember 2025 oleh peneliti. Pemilihan konten ini dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan tingkat viralitas, kekuatan *framing* wacana, serta kemampuan video tersebut untuk memicu respons publik. Subjek penelitian tidak merujuk pada individu tertentu, tetapi pada wacana berupa teks digital yang dihasilkan pengguna TikTok.

Data utama berupa 4 komentar netizen yang dipilih berdasarkan kriteria representasi posisi wacana dalam diskursus yang dianalisis. Pertama, komentar yang merepresentasikan *regime of truth*, yaitu pernyataan yang menegaskan atau membenarkan narasi tertentu sebagai kebenaran, seperti klaim bahwa tayangan hanya menyampaikan fakta atau normalisasi praktik keagamaan. Kedua, komentar yang mempresentasikan *counter-discourse*, yaitu pernyataan yang mengkritik, menolak, atau mendekonstruksi praktik dan otoritas yang dianggap tidak adil, khususnya terkait penghormata berlebihan terhadap kyai dan ketimpangan posisi sosial. Ketiga, komentar dipilih apabila mengandung posisi argumentatif yang jelas dan relevan dengan isu relasi kuasa dan gender dalam konteks pesantren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil analisis data yang terdiri dari konten video dan

komentar pengguna di platform TikTok yang terkait dengan liputan Trans7 tentang hubungan kekuasaan, otoritas kyai, dan praktik di lingkungan pesantren. Secara umum, data yang dikumpulkan menunjukkan adanya beragam respons yang dapat dikelompokkan dalam beberapa pola wacana utama yaitu dukungan terhadap narasi media sebagai representasi kenyataan, kritik terhadap praktik penghormatan yang dianggap berlebihan, upaya untuk mendekonstruksi sakralisasi figur kyai, dan munculnya resistensi termasuk dari individu dengan latar belakang pesantren. Selain itu, tampak bagaimana TikTok berfungsi sebagai ruang diskursif yang memungkinkan produksi dan distribusi wacana secara lebih terbuka, sehingga memperlihatkan bagaimana kekuasaan, pengetahuan, dan resistensi saling tarik menarik dalam konteks sosial keagamaan. Pola-pola ini kemudian akan dianalisis lebih lanjut melalui kategori tematik berikut

1. Representasi Otoritas Kyai dalam Tayangan Trans7

Representasi otoritas kyai yang digambarkan melalui media terutama televisi tidak hanya sebagai hiburan di ruang publik tetapi juga sebagai bentuk konstruksi makna yang dapat memengaruhi cara masyarakat memahami otoritas keagamaan. Analisis wacana digunakan agar dapat menekankan bagaimana visualisasi dalam tayangan dapat memunculkan berbagai tafsir, dari penguatan hingga pelemahan citra kyai sebagai sosok yang selama ini dianggap sakral dalam tradisi pesantren.

Cuplikan visual dari program *Xpose* Trans7 menampilkan dua pria yang digambarkan mengenakan atribut santri atau kyai dengan gestur tubuh yang dinilai berlebihan, seperti membungkuk secara ekstrem. Representasi visual tersebut kemudian dipersepsikan oleh sebagian publik sebagai bentuk pelecehan terhadap figur kyai dan tradisi pesantren yang selama ini dipandang sakral. Tayangan ini memicu reaksi keras di ruang digital, khususnya di TikTok, di mana netizen menilai bahwa media televisi telah gagal menjaga sensitivitas terhadap simbol dan nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat (Masrur, 2017). Tayangan tersebut tidak lagi dipahami sekadar sebagai hiburan, melainkan sebagai pemantik perdebatan serius mengenai bagaimana otoritas keagamaan direpresentasikan di ruang publik.



Gambar 1. Cuplikan video tayangan *Xpose Trans7* yang diunggah akun TikTok *Duniadian Kebudayaan* (diunggah 14 Oktober 2025, diakses 10 Desember 2025).

Tayangan ini dapat dipahami sebagai praktik produksi wacana oleh media. Media memiliki kuasa untuk membingkai realitas sosial melalui representasi visual, termasuk dalam mendefinisikan bagaimana figur kyai ditampilkan dan dimaknai oleh khalayak. Dalam konteks ini, figur kyai yang selama ini diposisikan sebagai tokoh berwibawa dan penuh kharisma dalam struktur pesantren justru direpresentasikan dalam posisi yang dianggap merendahkan. Padahal, dalam tradisi pesantren, otoritas kyai dibangun melalui kombinasi antara keteladanan moral, penguasaan ilmu agama, serta relasi hierarkis yang kuat dengan santri (Ramdan & Usman, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa otoritas keagamaan tidak hanya diproduksi dan dipertahankan melalui institusi pesantren, tetapi juga dapat dinegosiasikan, bahkan diganggu, melalui representasi media massa (Solihin & Efendi, 2025).

Reaksi keras publik terhadap tayangan tersebut memperlihatkan bahwa kuasa media tidak pernah bekerja secara sepihak, melainkan selalu berhadapan dengan kemungkinan resistensi. Kritik netizen di TikTok yang menilai tayangan *Xpose* sebagai bentuk penghinaan terhadap kyai mencerminkan penolakan atas cara media merepresentasikan otoritas keagamaan. Resistensi ini menunjukkan bahwa publik tidak sepenuhnya pasif dalam menerima wacana media, melainkan turut berperan sebagai subjek yang aktif menafsirkan, menilai, dan menentang representasi yang dianggap tidak adil. Dengan demikian, tayangan *Trans7* menjadi arena pertarungan wacana antara otoritas media dan otoritas keagamaan, di mana media sosial berfungsi sebagai ruang artikulasi kritik dan perlawanan simbolik terhadap kuasa representasi media (Masrur,

2017; Solihin & Efendi, 2025).

2. Kuasa Media sebagai Produsen Fakta

Muncul pandangan yang menempatkan media sebagai penyampai realitas yang objektif. Tidak seluruh audiens memandang tayangan tersebut sebagai suatu penyimpangan, tetapi sebagai gambaran fakta yang sesungguhnya. Perbedaan dalam pandangan ini mengindikasikan bahwa media memiliki peranan penting sebagai sumber kebenaran bagi sebagian masyarakat. Keyakinan ini sekaligus menunjukkan bahwa media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk perspektif masyarakat terhadap suatu peristiwa.



Gambar 2. Komentar netizen Obi Yoby pada video akun TikTok *Duniadian Kebudayaan* (diakses 10 Desember 2025).

Komentar dari pengguna TikTok bernama Obi Yoby, "*Trans7 hanya menyampaikan fakta si menurut gua,*" muncul sebagai pandangan yang berbeda di tengah dominasi kritik terhadap tayangan *Xpose Trans7*. Di saat banyak netizen mempersoalkan tayangan tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap figur kyai dan tradisi pesantren, komentar ini justru menempatkan media sebagai pihak yang tidak bermaksud menghina. Tayangan tersebut dipahami sebagai representasi realitas yang dianggap wajar dan tidak memiliki muatan simbolik yang problematis. Cara pandang ini memperlihatkan bahwa media masih dilihat oleh sebagian audiens sebagai institusi yang bekerja secara objektif dan netral, tanpa intervensi kepentingan tertentu. Persepsi ini kemudian membentuk dasar legitimasi bagi media untuk tetap dipercaya dalam menyampaikan informasi sensitif, termasuk yang berkaitan dengan simbol keagamaan.

Banyaknya dukungan terhadap komentar Oby Yoby, yang terlihat dari puluhan ribu suka dan ratusan komentar balasan, menunjukkan bahwa pandangan tersebut diterima secara luas di kalangan pengguna TikTok. Dukungan ini mengindikasikan bahwa

masih ada segmen masyarakat yang menganggap media utama sebagai acuan utama dalam menilai kebenaran suatu peristiwa. Media dianggap memiliki tingkat otoritas pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan interpretasi pribadi atau kritik berlandaskan nilai, sehingga keyakinan terhadapnya bersifat tidak hanya pribadi, tetapi juga kolektif dan sosial (Rachmadhani, 2021). Dalam hal ini, penerimaan terhadap tayangan sebagai “kebenaran” bisa diartikan sebagai pengakuan terhadap kekuasaan media dalam menciptakan dan menstandarisasi kebenaran sosial, sekaligus mengukuhkan perannya dalam menentukan apa yang dianggap sebagai realitas yang sah dalam diskusi publik di ranah digital. Melalui proses ini, media membentuk *regime of truth* yang diterima secara luas dan jarang dipertanyakan secara kritis.

Penerimaan terhadap klaim faktualitas media menunjukkan bagaimana kuasa bekerja melalui proses internalisasi dalam diri audiens. Sebagian netizen secara tidak sadar mengadopsi kerangka penafsiran yang ditawarkan media dalam memahami tayangan *Xpose* Trans7. Dalam situasi ini, kuasa media tidak bekerja melalui paksaan atau sensor, tetapi melalui pembentukan cara berpikir yang membatasi kemungkinan pembacaan alternatif terhadap tayangan yang sama. Komentar Obi Yoby juga memperlihatkan dinamika resistensi yang khas dalam analisis Foucauldian. Jika kritik terhadap Trans7 dipahami sebagai bentuk perlawanan terhadap representasi yang dianggap merendahkan kyai, maka pembelaan terhadap media justru dapat dibaca sebagai resistensi terhadap resistensi tersebut (Rachmadhani, 2021). Komentar ini menolak narasi penghinaan dan menggantikannya dengan narasi faktualitas. Dengan cara ini, resistensi tidak selalu berfungsi untuk menantang kuasa dominan, tetapi dapat pula berperan dalam menjaga stabilitas kuasa yang telah mapan.

Ruang komentar di TikTok berfungsi sebagai arena konflik antara dua pandangan mengenai kebenaran yang bertentangan, yaitu diskusi yang menekankan pentingnya etika dalam representasi dan penghormatan terhadap simbol-simbol keagamaan, serta diskusi yang menekankan objektivitas media dengan memandang konten sebagai cerminan dari kenyataan. Pertarungan ini menunjukkan bahwa kebenaran tidak tunggal, melainkan dibentuk melalui hubungan yang dinamis dan penuh negosiasi, di mana media sosial menjadi tempat pertemuan berbagai perspektif yang saling mempengaruhi (Rachmadhani, 2021). Dominasi klaim kebenaran faktual menggeser fokus perdebatan dari isu etika menuju isu epistemik seputar kebenaran. Konten yang dianggap problematis secara

simbolis tetap bisa diterima selama ia dikemas sebagai “fakta” dan mendapatkan pengakuan dari media, sehingga aspek etis dan budaya berisiko terabaikan dalam diskusi publik di dunia digital.

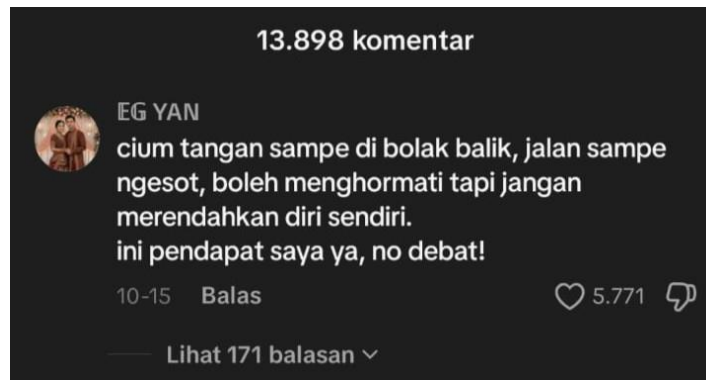
Secara keseluruhan, komentar Obi Yoby memperlihatkan bahwa sebagian publik masih memberikan legitimasi kuat kepada media sebagai produsen kebenaran. Kuasa media tidak hanya bekerja melalui produksi dan distribusi informasi, tetapi juga melalui pengakuan sosial yang diberikan oleh audiens. Pembelaan terhadap media menjadi bagian dari mekanisme kuasa yang menormalkan representasi dan meredam kritik terhadap cara media menggambarkan figur kyai dan pesantren. Kondisi ini menegaskan bahwa relasi kuasa di ruang digital bersifat kompleks, berlapis, dan terus diproduksi melalui interaksi antara media, publik, dan wacana tandingan.

3. Tubuh sebagai Arena Kuasa dan Resistensi

Komentar yang muncul tidak hanya terbatas pada isu representasi figur kyai, tetapi juga beralih pada cara tubuh ditempatkan dalam hubungan kekuasaan antara kyai dan santri. Tindakan fisik yang selama ini dianggap sebagai bentuk penghormatan, seperti membungkuk atau mencium tangan, mulai dipertanyakan maknanya, terutama ketika ditampilkan di ruang publik digital. Paparan media membuat praktik yang sebelumnya dianggap biasa dalam konteks pesantren menjadi terbuka untuk diinterpretasikan kembali oleh masyarakat yang lebih luas. Tubuh tidak lagi sekadar menjadi sara ekspresi budaya, melainkan bertransformasi menjadi arena di mana nilai, norma, dan hubungan kekuasaan dinegosiasikan, dipertahankan, bahkan ditentang oleh masyarakat. Perbedaan cara pandang ini menunjukkan adanya perubahan dalam memahami batas antara penghormatan dan subordinasi, terutama ketika praktik tersebut dihadapkan pada perspektif publik yang lebih beragam.

Komentar dari pengguna TikTok EG YAN yang menyatakan, “*Cium tangan sampe di bolak balik, jalan sampe ngesot, boleh menghormati tapi jangan merendahkan diri sendiri,*” secara langsung menyoroti praktik penghormatan yang dianggap berlebihan terhadap figur kyai. Kritik ini muncul sebagai respons atas tradisi pesantren yang menekankan gestur tubuh tertentu sebagai simbol kepatuhan dan penghormatan, seperti mencium tangan berulang kali atau berjalan dengan posisi tubuh yang merendah. Praktik-praktik tersebut selama ini dipahami sebagai bentuk adab dan etika dalam relasi santri–kyai, yang diwariskan secara turun-temurun dalam kultur pesantren (Masrur, 2017).

Namun, komentar EG YAN menolak pemaknaan tersebut dengan menekankan bahwa penghormatan tidak seharusnya mengorbankan martabat individu.



Gambar 3. Komentar netizen EG YAN pada video akun TikTok *Duniadian Kebudayaan* (diakses 10 Desember 2025).

Nada tegas dalam komentar tersebut memperlihatkan penolakan terhadap subordinasi tubuh yang dianggap tidak proporsional. EG YAN menegaskan bahwa penghormatan kepada kyai tetap dimungkinkan tanpa harus diwujudkan melalui gestur ekstrem yang merendahkan diri. Sikap ini memperoleh dukungan luas berupa ribuan tanda suka dan ratusan balasan, yang menunjukkan bahwa pandangan tersebut memiliki resonansi di kalangan netizen. Dukungan ini mengindikasikan adanya kegelisahan kolektif terhadap praktik disiplin tubuh yang selama ini dinormalisasi dalam tradisi pesantren, khususnya ketika praktik tersebut ditampilkan dan diperdebatkan di ruang digital (Ramdan & Usman, 2021). Fenomena ini memperlihatkan bahwa tubuh menjadi titik awal munculnya kritik terhadap relasi kuasa yang mapan.

Dalam perspektif Michel Foucault, tubuh merupakan arena utama tempat kuasa beroperasi secara paling konkret. Relasi antara santri dan kyai tidak hanya dibentuk oleh struktur institusional pesantren, tetapi juga melalui praktik disiplin tubuh yang mengatur bagaimana santri harus bersikap, bergerak, dan menempatkan dirinya di hadapan kyai. Gestur seperti mencium tangan atau berjalan dengan posisi tubuh rendah merupakan bentuk internalisasi kuasa yang bekerja secara halus, tetapi efektif dalam menegaskan hierarki sosial dan otoritas keagamaan (Masrur, 2017). Melalui praktik ini, tubuh santri dilatih untuk patuh dan tunduk sebagai bagian dari proses pembentukan subjek yang taat.

Komentar EG YAN dapat dipahami sebagai bentuk resistensi terhadap mekanisme disiplin tubuh tersebut. Dengan menolak praktik penghormatan yang dianggap merendahkan martabat, komentar ini menunjukkan bahwa tubuh tidak hanya menjadi

objek kuasa, tetapi juga dapat berfungsi sebagai medium perlawanan. Resistensi ini tidak muncul dalam bentuk penolakan agama atau figur kyai secara langsung, melainkan melalui kritik terhadap cara kuasa dijalankan melalui tubuh. Dalam kerangka Foucauldian, resistensi semacam ini justru menegaskan bahwa di mana ada kuasa, di situ selalu ada kemungkinan perlawanan (Ramdan & Usman, 2021).

Kritik terhadap praktik penghormatan berlebihan juga mencerminkan pergeseran nilai yang terjadi dalam masyarakat digital. Jika dalam tradisi pesantren penghormatan fisik dipahami sebagai wujud kesalehan dan loyalitas, maka dalam ruang digital praktik tersebut mulai ditafsirkan ulang. Netizen seperti EG YAN menekankan bahwa penghormatan seharusnya bersifat proporsional dan tidak meniadakan harga diri individu. Pergeseran ini menunjukkan adanya transformasi wacana, di mana otoritas kyai tidak lagi diterima secara absolut, tetapi mulai dinegosiasikan ulang melalui diskursus publik (Masrur, 2017). Tubuh, dalam hal ini, menjadi titik temu antara tradisi lama dan cara pandang baru.

Komentar tersebut memproduksi wacana emansipatif yang menekankan pentingnya kesetaraan dan martabat individu. Pernyataan *“boleh menghormati tapi jangan merendahkan diri sendiri”* menggeser diskursus dari kepatuhan total menuju penghormatan yang lebih manusiawi dan reflektif. Wacana ini dapat dipahami sebagai upaya membongkar rejim kebenaran lama yang memaknai kepatuhan tubuh sebagai satu-satunya bentuk adab yang sah (Anugrah & Fauzi, 2019). Kuasa yang sebelumnya bekerja melalui normalisasi gestur tubuh kini mulai dipertanyakan, membuka ruang bagi redefinisi relasi kuasa yang lebih egaliter.

Komentar EG YAN tidak hanya merepresentasikan kritik terhadap praktik penghormatan tertentu, tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap struktur kuasa tradisional yang mengontrol tubuh dan martabat individu. Tubuh yang sebelumnya diposisikan sebagai objek disiplin kini tampil sebagai arena resistensi dan negosiasi makna. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat digital, relasi kuasa keagamaan tidak lagi bersifat statis, melainkan terus diproduksi dan diperdebatkan melalui interaksi wacana di media sosial.

Meskipun komentar yang muncul tidak secara langsung membahas masalah gender, praktik penghormatan melalui bahasa tubuh dalam tradisi pesantren tidak bisa dipisahkan dari konteks hubungan gender yang menyertainya. Dalam banyak kondisi,

perempuan sering kali dihadapkan pada tuntutan kesopanan dan kepatuhan yang lebih ketat dibandingkan dengan laki-laki, terutama terkait dengan ekspresi tubuh di hadapan pihak berkuasa. Karena itu, kritik terhadap tindakan yang dianggap berlebihan juga bisa dilihat sebagai kritik terhadap sistem disiplin yang mungkin berjalan secara tidak adil. Di sini, tubuh bukan hanya menjadi objek pengawasan sosial, tetapi juga menjadi sarana di mana norma-norma gender dibentuk, dipelihara, dan dianggap biasa dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, perubahan makna penghormatan yang lebih setara juga memberikan kesempatan untuk mempertanyakan ulang batasan-batasan yang selama ini membentuk hubungan antara otoritas, tubuh, dan gender di dalam konteks pesantren.

4. Dekonstruksi Sakralisasi Figur Kyai

Pada ruang digital, sakralisasi terhadap figur kyai tidak lagi diterima secara mutlak, tetapi mulai mengalami dekonstruksi melalui berbagai pandangan kritis dari masyarakat. Otoritas yang sebelumnya dibangun melalui tradisi, simbol, serta hubungan hierarkis kini berhadapan dengan pola pikir yang lebih rasional dan reflektif. Akses media dan keterbukaan informasi mendorong masyarakat untuk melihat batas antara penghormatan dan pengkultusan, terutama ketika sosok kegamaan ditampilkan dalam konteks yang berbeda dari lingkungan pesantren. Kesakralan tidak lagi bersifat absolut, melainkan sesuatu yang dapat diperdebatkan, dinegosiasikan, dan bahkan dipertanyakan oleh publik secara luas.



Gambar 4. Komentar netizen Cinepolis pada video akun TikTok *Duniadian Kebudayaan* (diakses 10 Desember 2025).

Komentar dari pengguna TikTok Cinepolis yang menyatakan, “*Gw muslim, tp emg itu fakta. Mereka cmn manusia biasa, bukan nabi bukan malaikat. Hormat sepantasnya aja, sopan jg sewajarnya,*” secara tegas mengekspresikan pandangan kritis terhadap proses sakralisasi figur kyai. Dengan menekankan bahwa kyai adalah manusia

biasa, komentar ini menolak cara pandang tradisional yang menempatkan kyai dalam posisi yang nyaris setara dengan figur suci (Fanaqi, 2019). Dalam tradisi pesantren, posisi kyai memang sering dilekatkan dengan otoritas moral dan simbolik yang tinggi, sehingga sulit untuk dipisahkan antara penghormatan dan pengkultusan (Masrur, 2017; Mustaqim & Kurwidaria, 2025). Komentar Cinepolis hadir sebagai upaya membatasi kembali makna penghormatan agar tidak melampaui batas kewajaran.

Dukungan yang cukup besar terhadap komentar tersebut, yang ditunjukkan oleh lebih dari dua puluh ribu tanda suka, mengindikasikan bahwa pandangan ini memiliki resonansi luas di kalangan netizen. Dukungan ini menunjukkan adanya kelompok publik yang mulai merasa perlu mengkritisi bentuk-bentuk penghormatan yang dianggap berlebihan. Dalam konteks masyarakat digital, kritik semacam ini mencerminkan meningkatnya kesadaran publik untuk mempertanyakan otoritas keagamaan yang sebelumnya diterima tanpa perdebatan (Rachmadhani, 2021). Fenomena ini memperlihatkan bahwa ruang digital membuka peluang bagi munculnya wacana yang lebih kritis dan reflektif.

Respon tersebut menandai adanya bentuk dekonstruksi terhadap rejim kebenaran yang selama ini memposisikan kyai sebagai figur sakral dan tak tersentuh. Kuasa kyai dalam tradisi pesantren tidak hanya bersumber dari penguasaan ilmu agama, tetapi juga dari konstruksi sosial yang menempatkan mereka pada posisi hierarkis di atas umat (Fanaqi, 2019; Mustaqim & Kurwidaria, 2025). Melalui pernyataan bahwa kyai bukan nabi atau malaikat, komentar ini menolak klaim sakralitas tersebut dan memproduksi wacana tandingan yang lebih egaliter (Solihin & Efendi, 2025). Kuasa simbolik yang sebelumnya bekerja melalui status sosial dan legitimasi moral mulai dipertanyakan secara terbuka.

Komentar tersebut juga memperlihatkan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat Muslim kontemporer. Jika sebelumnya penghormatan terhadap kyai dipahami sebagai kewajiban moral yang tidak dapat diganggu gugat, kini penghormatan mulai dimaknai sebagai sikap yang tetap harus rasional dan proporsional (Fanaqi, 2019). Netizen seperti Cinepolis menekankan bahwa sikap hormat tidak harus diwujudkan dalam bentuk pengagungan berlebihan, melainkan cukup dalam batas sopan santun yang wajar. Pergeseran ini menunjukkan bahwa otoritas keagamaan tidak lagi diterima secara absolut, tetapi dinegosiasikan ulang sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang terus berubah

(Masrur, 2017). Proses ini menandai perubahan cara pandang umat terhadap figur keagamaan.

Komentar Cinepolis memproduksi wacana emansipatif yang menekankan kesetaraan antara kyai dan umat. Dengan menolak sakralisasi, komentar ini membuka ruang bagi publik untuk melihat kyai sebagai manusia biasa yang tetap dapat dikritisi dan dievaluasi secara rasional. Dalam perspektif Foucauldian, wacana ini merupakan bentuk resistensi terhadap rejim kebenaran lama yang memposisikan kyai sebagai figur yang berada di luar jangkauan kritik (Solihin & Efendi, 2025). Resistensi ini tidak hanya melemahkan kuasa simbolik kyai, tetapi juga memperkuat posisi publik sebagai subjek aktif dalam mendefinisikan ulang relasi kuasa keagamaan.

Komentar Cinepolis dapat dipahami sebagai simbol pergeseran otoritas dari ruang tradisional menuju ruang digital yang lebih partisipatif. Media sosial memungkinkan publik untuk terlibat langsung dalam produksi dan perdebatan makna mengenai otoritas keagamaan. Relasi kuasa yang sebelumnya bersifat vertikal dan hierarkis kini bergerak menjadi lebih horizontal, seiring dengan terbukanya ruang diskursus yang memungkinkan kritik, negosiasi, dan redefinisi otoritas secara kolektif (Mustaqim & Kurwidaria, 2025).

5. Resistensi Internal dari Alumni Pesantren

Kritik terhadap praktik penghormatan dalam tradisi pesantren tidak hanya berasal dari pihak luar, tetapi juga muncul dari individu yang memiliki hubungan dekat dengan lingkungan tersebut. Suara alumni pesantren menunjukkan bahwa terapat perkembangan wacana resistensi secara internal, sebagai bagian dari refleksi atas pengalaman yang telah dilalui. Posisi ini menarik karena menawarkan perspektif yang lebih kompleks, di mana penghormatan terhadap nilai tradisi tetap dihargai, namun juga disertai upaya untuk mengevaluasi praktik yang dianggap sudah tidak relevan. Dalam konteks ruang digital, pengalaman pribadi tersebut kemudian dijadikan sebagai wacana publik yang membuka ruang bagi kritik dari dalam, sambil menunjukkan bahwa relasi kekuasaan dalam tradisi pesantren tidak sepenuhnya kaku, melainkan dapat dipertanyakan oleh individu yang pernah menjadi bagian dari dalamnya.

Komentar dari pengguna TikTok bernama omeprazole, "*maaf sy alumni pondok tp mengiyakan maafskali,*" menjadi suara yang menarik karena berasal dari individu yang memiliki latar belakang pesantren. Dengan secara terbuka menyatakan persetujuan terhadap kritik yang menolak praktik penghormatan berlebihan terhadap kyai, komentar

ini menunjukkan bahwa resistensi tidak hanya datang dari luar komunitas pesantren. Posisi sebagai alumni memberikan bobot tersendiri pada kritik tersebut, karena ia berbicara dari pengalaman langsung berada dalam sistem nilai dan praktik pesantren (Solihin & Efendi, 2025). Kehadiran suara semacam ini memperlihatkan bahwa kritik terhadap otoritas kyai juga tumbuh dari dalam tradisi itu sendiri.



Gambar 5. Komentar netizen omeprazole pada video akun TikTok *Duniadian Kebudayaan* (diakses 10 Desember 2025).

Pilihan kata “maaf” yang diulang dua kali serta penggunaan emotikon menunjukkan adanya ketegangan identitas yang dialami oleh penulis komentar. Di satu sisi, ia masih menunjukkan rasa hormat dan keterikatan emosional terhadap nilai-nilai pesantren. Di sisi lain, ia ingin menegaskan sikap kritis terhadap praktik yang dianggap merendahkan martabat individu. Ambivalensi ini mencerminkan posisi subjek yang berada di persimpangan antara loyalitas terhadap tradisi dan kesadaran kritis sebagai individu reflektif. Dukungan berupa ribuan tanda suka dan puluhan balasan menunjukkan bahwa pandangan ini mendapat resonansi, terutama karena disampaikan oleh figur yang dipersepsikan sebagai “orang dalam” komunitas pesantren (Solihin & Efendi, 2025).

Ungkapan omeprazole mengindikasikan bahwa kuasa tidak pernah bersifat monolitik atau sepenuhnya stabil. Kuasa selalu membuka kemungkinan munculnya resistensi, bahkan dari subjek yang berada di dalam struktur kuasa itu sendiri. Alumni pesantren, yang secara normatif diharapkan mereproduksi nilai-nilai penghormatan terhadap kyai, justru tampil sebagai agen resistensi yang mempertanyakan praktik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kuasa tidak hanya bekerja secara vertikal dari atas ke bawah, tetapi juga beredar dalam jaringan relasi yang memungkinkan munculnya kritik internal (Anugrah & Fauzi, 2019).

Resistensi yang datang dari alumni pesantren memiliki kekuatan legitimasi yang lebih besar dibandingkan kritik dari luar komunitas. Sebagai bagian dari sistem yang

dikritik, alumni memiliki otoritas pengalaman yang membuat kritiknya sulit untuk dengan mudah didiskreditkan. Dalam konteks ini, komentar omeprazole berfungsi sebagai retakan dalam legitimasi otoritas kyai, karena menunjukkan bahwa bahkan mereka yang pernah berada dalam struktur tersebut tidak sepenuhnya menerima praktik penghormatan yang dinormalisasi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa otoritas keagamaan harus berhadapan dengan evaluasi kritis dari subjek-subjek yang sebelumnya dianggap patuh (Solihin & Efendi, 2025).

Komentar tersebut juga mencerminkan adanya transformasi nilai dalam komunitas keagamaan. Jika sebelumnya penghormatan terhadap kyai dipahami sebagai kewajiban moral yang tidak dapat diganggu gugat, kini bahkan alumni pesantren mulai mempertanyakan bentuk dan batas penghormatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas kyai tidak lagi diterima secara absolut, melainkan dinegosiasikan ulang seiring dengan perubahan konteks sosial dan berkembangnya ruang diskursus digital (Anugrah & Fauzi, 2019). Tradisi pesantren, dalam hal ini, tidak lagi dipahami sebagai sistem nilai yang tertutup dari kritik.

Komentar omeprazole memproduksi wacana baru yang menekankan keberanian untuk bersuara kritis meskipun berasal dari dalam tradisi. Dengan menyatakan persetujuan terhadap kritik, ia menunjukkan bahwa loyalitas terhadap pesantren tidak harus diwujudkan dalam penerimaan tanpa syarat terhadap semua praktik yang ada. Dalam kerangka Foucauldian, resistensi semacam ini menegaskan bahwa kuasa selalu berhadapan dengan perlawanan, bahkan dari subjek yang secara struktural diharapkan tunduk. Resistensi internal ini memperkuat posisi publik sebagai subjek aktif yang berhak mendefinisikan ulang relasi kuasa, sekaligus memperlemah klaim absolut otoritas kyai.

Komentar omeprazole menjadi bukti bahwa ruang digital membuka peluang bagi individu untuk menegosiasikan identitas, loyalitas, dan otoritas secara lebih bebas. Media sosial memungkinkan alumni pesantren untuk menyuarakan kritik tanpa harus sepenuhnya memutus keterikatan dengan tradisi. Fenomena ini menunjukkan bahwa relasi kuasa keagamaan di era digital bersifat semakin cair, terbuka, dan terus mengalami pergeseran melalui produksi wacana dari dalam komunitas itu sendiri.

6. TikTok sebagai Ruang Produksi Wacana Emansipatif

Untuk memperjelas pola temuan dari keseluruhan komentar, berikut adalah tabel ringkasan tematik:

Tabel 1. Tabel Ringkasan Tematik

No.	Komentar	Temuan Utama	Bentuk Wacana	Makna Sosiologis
1.	“Trans7 hanya menyampaikan fakta si menurut gua”	Kuasa media	Legitimasi media	Media sebagai penyampai kebenaran objektif
2.	“Cium tangan sampe di bolak balik, jalan sampe ngesot, boleh menghormati tapi jangan merendahkan diri sendiri”	Tubuh dan penghormatan	Wacana emansipatif	Penolakan terhadap praktik penghormatan yang merendahkan martabat
3.	“Gw muslim, tp emg itu fakta. Mereka cmn manusia biasa, bukan nabi bukan malaikat. Hormat sepantasnya aja, sopan jg sewajarnya”	Dekonstruksi otoritas	Kritik terhadap sakralisasi	Pembongkaran kesakralan figur kyai
4.	“maaf sy alumni pondok tp mengiyakan maaf skali”	Resistensi internal	Refleksi dari dalam	Kritik muncul dari aktor internal (alumni pesantren)

Analisis terhadap komentar-komentar netizen menunjukkan bahwa TikTok telah berkembang menjadi arena baru bagi pertarungan wacana mengenai otoritas kyai dan representasi pesantren. Berbeda dengan ruang-ruang tradisional seperti majelis taklim atau pesantren yang cenderung hierarkis, ruang digital ini bersifat lebih terbuka, partisipatif, dan horizontal. Dalam konteks ini, netizen tidak hanya berperan sebagai konsumen tayangan media, tetapi juga sebagai produsen wacana yang aktif menyuarakan kritik, pembelaan, serta refleksi atas representasi keagamaan yang mereka temui (Rachmadhani, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pembentukan makna.

Keterlibatan aktif netizen dalam ruang komentar TikTok memperlihatkan pergeseran penting dalam relasi kuasa antara media, otoritas keagamaan, dan publik. Tayangan televisi yang sebelumnya bersifat satu arah kini tidak lagi diterima secara pasif, melainkan ditanggapi, ditafsirkan, dan bahkan dipersoalkan secara terbuka. Melalui interaksi diskursif yang berlangsung di kolom komentar, kuasa media tidak lagi berdiri sendiri sebagai produsen makna, tetapi harus berhadapan dengan interpretasi dan penilaian publik yang beragam (Rachmadhani, 2021). TikTok, dalam hal ini, berfungsi sebagai medium emansipatif yang memungkinkan masyarakat mendefinisikan ulang relasi kuasa secara kolektif.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa kuasa selalu melahirkan resistensi, dan resistensi tersebut dapat berkembang menjadi wacana tandingan. Komentar-komentar netizen di TikTok menunjukkan adanya polarisasi wacana yang jelas. Sebagian netizen membela media dengan menekankan klaim faktualitas, sementara yang lain menolak praktik penghormatan berlebihan terhadap kyai yang dianggap merendahkan martabat individu (Rachmadhani, 2021). Polarisasi ini menunjukkan bahwa ruang digital menjadi tempat di mana berbagai klaim kebenaran saling berhadapan dan diperdebatkan secara terbuka.

Keikutsertaan alumni pesantren dalam perdebatan ini semakin menegaskan kompleksitas dinamika kuasa di ruang digital. Resistensi tidak hanya datang dari pihak luar yang tidak memiliki keterikatan dengan tradisi pesantren, tetapi juga dari individu yang pernah berada di dalam struktur tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa TikTok menjadi ruang di mana batas antara “orang dalam” dan “orang luar” menjadi semakin cair, memungkinkan munculnya kritik internal yang memiliki legitimasi kuat. Dalam konteks ini, wacana tandingan tidak hanya bersifat oposisi, tetapi juga reflektif terhadap tradisi itu sendiri (Rachmadhani, 2021).

TikTok memperlihatkan bagaimana wacana baru tentang otoritas keagamaan mulai terbentuk dan dinormalisasi. Jika sebelumnya kyai diposisikan sebagai figur sakral yang sulit disentuh kritik, kini mereka mulai dipahami sebagai manusia biasa yang tetap dapat dipertanyakan secara rasional. Netizen menekankan bahwa penghormatan terhadap kyai seharusnya tetap proporsional dan tidak merendahkan martabat individu. Wacana ini merepresentasikan bentuk emansipasi digital yang menantang rejim kebenaran lama tentang otoritas keagamaan, sekaligus membuka ruang negosiasi baru dalam memahami

relasi kuasa (Rachmadhani, 2021).

Implikasi dari fenomena ini cukup signifikan bagi studi tentang relasi kuasa dalam masyarakat kontemporer. TikTok menunjukkan bahwa otoritas keagamaan tidak lagi diterima secara absolut, melainkan harus berhadapan dengan kritik publik yang muncul secara spontan, masif, dan terdistribusi. Kuasa media pun tidak lagi bersifat dominan, karena harus bernegosiasi dengan suara-suara publik yang aktif memproduksi makna. Dengan demikian, ruang digital menjadi arena di mana kuasa dan resistensi saling berinteraksi, melahirkan wacana yang lebih egaliter dan partisipatif. Fenomena ini menegaskan bahwa media sosial memainkan peran penting dalam membentuk dinamika relasi kuasa di masyarakat modern, sekaligus membuka peluang untuk memahami aspek gender dalam praktik sosial keagamaan, terutama mengenai bagaimana tubuh dan ketaatan dibentuk serta dibicarakan di ruang publik.

PENUTUP

Simpulan

Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa hubungan kekuasaan dalam konteks agama khususnya di lingkungan pesantren, tidak lagi sepenuhnya bersifat *top-down* seperti dijelaskan dalam teori klasik Michel Foucault, melainkan mengalami perubahan seiring dengan kemajuan dalam dunia digital. Platform media sosial seperti TikTok menciptakan ruang baru di mana kekuasaan tidak hanya dihasilkan oleh otoritas keagamaan atau media, tetapi juga dikelola secara aktif oleh masyarakat melalui praktik diskursif seperti komentar. Hasil penelitian memperkuat pandangan Foucault bahwa kekuasaan bersifat produktif dan tersebar, tetapi juga memperluas gagasan tersebut dengan menunjukkan bahwa teknologi digital mempercepat penyebaran wacana dan menciptakan ruang perlawanan yang lebih setara dan partisipatif. Pesantren di Indonesia memiliki banyak nilai sakral dan struktur hierarkis, dinamika ini juga menantang bentuk-bentuk kekuasaan tradisional dengan membuka kemungkinan untuk mendekonstruksi otoritas dan praktik penghormatan yang telah dianggap ketat selama ini. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan menjelaskan bahwa hubungan kekuasaan dalam masyarakat modern tidak hanya tersebar, tetapi juga semakin cair dan responsif terhadap negosiasi publik, terutama melalui peran media sosial sebagai tempat produksi wacana.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai representasi otoritas kyai dalam tayangan *Xpose Trans7* serta respon netizen di TikTok, terdapat sejumlah saran yang dapat diajukan untuk berbagai pihak terkait. Saran ini diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi media, komunitas pesantren, masyarakat pengguna media sosial, serta peneliti selanjutnya. Dengan adanya saran ini, penelitian tidak hanya berhenti pada analisis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi perbaikan dan pengembangan wacana di ruang publik digital maupun tradisional.

Bagi Media Massa

Media massa khususnya televisi penting untuk lebih sensitif terhadap simbol-simbol keagamaan dalam setiap produksi konten. Tayangan yang menyentuh ranah keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas. Media perlu mengedepankan prinsip etika representasi, dengan mempertimbangkan dampak tayangan terhadap komunitas yang menjadi objek visual. Proses editorial yang lebih ketat, termasuk melibatkan pihak-pihak yang memahami konteks budaya dan keagamaan, dapat membantu mencegah munculnya kontroversi serupa di masa depan.

Bagi Komunitas Pesantren dan Otoritas Keagamaan

Fenomena resistensi di ruang digital menunjukkan perlunya refleksi terhadap praktik penghormatan tradisional. Kritik yang muncul dari netizen, bahkan dari alumni pesantren sendiri, memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat mulai menuntut bentuk penghormatan yang lebih rasional dan proporsional. Komunitas pesantren dapat menjadikan fenomena ini sebagai momentum untuk meninjau ulang praktik-praktik yang berpotensi merendahkan martabat individu, tanpa harus menghilangkan nilai penghormatan itu sendiri. Dengan melakukan penyesuaian, tradisi dapat tetap dijaga, tetapi dalam bentuk yang lebih relevan dengan konteks sosial modern.

Bagi Masyarakat Pengguna Media Sosial

Fenomena ini menunjukkan pentingnya literasi digital dalam menyikapi konten yang beredar. Netizen perlu menyadari bahwa setiap komentar dan respon yang mereka berikan turut membentuk wacana publik. Oleh karena itu, sikap kritis harus diimbangi dengan etika komunikasi yang sehat, sehingga ruang digital dapat menjadi arena diskusi yang produktif, bukan sekadar arena polarisasi. Literasi digital juga membantu

masyarakat untuk membedakan antara fakta, opini, dan framing media, sehingga tidak mudah terjebak dalam klaim kebenaran yang semu. Dengan meningkatnya literasi digital, masyarakat dapat lebih bijak dalam berpartisipasi di ruang publik online.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Fenomena ini membuka peluang untuk mengkaji lebih dalam dinamika otoritas keagamaan di era digital. Penelitian lanjutan disarankan untuk merancang studi yang lebih komparatif dan menggunakan data yang lebih bervariasi. Sebagai contoh, penelitian dapat mengeksplorasi apakah pola kontra-wacana yang serua muncul dalam konteks liputan tokoh agama dari tradisi yang berbeda, dengan menerapkan metode analisis wacana komparatif across platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Selain itu, peneliti dapat menambah jumlah data dengan teknik pengambilan sampel yang lebih terorganisir, seperti *purposive sampling* atau *theoretical sampling*, agar variasi wacana yang diteliti menjadi lebih representatif. Pendekatan metodologis juga bisa diperluas dengan menggabungkan analisis wacana dengan metode lain, seperti wawancara mendalam untuk menggali bagaimana wacana digital tersebut diinterpretasikan dan memberikan dampak pada prakti sosial di kehidupan nyata. Dengan ini, penelitian selanjutnya tidak hanya memperluas konteks tetapi juga memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai dinamika hubungan kekuasaan di ruang digital.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, data yang digunakan dalam penelitian hanya berpusat pada satu konten akun TikTok, sehingga tidak mampu merepresentasikan keseluruhan dinamika wacana yang lebih luas di platform tersebut. Kedua, analisis hanya dilakukan pada empat komentar sebagai unit data utama, sehingga mungkin terdapat variasi wacana lain yang tidak tercakup pada analisis ini. Kemudian, penerapan teori relasi kekuasaan Michel Foucault dalam konteks pesantren di Indonesia memiliki batasan, mengingat teori tersebut dikembangkan dalam konteks sosial Barat yang berbeda dari realitas sosial-keagamaan di Indonesia. Hasil penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai pembacaan kontekstual yang membuka ruang interpretasi, bukan sebagai generalisasi yang bersifat universal.

DAFTAR PUSTAKA

Alfani, M., & Anwar, L. (2024). Kontekstualisasi Hadis Dalam Era Digital: Retorika Dan Otoritas Keagamaan Influencer Dakwah Di Media Sosial. *UNIVERSUM: Jurnal Keislaman dan Keindonesiaan*, 18(2), 83–103.

- Anugrah, Y. V., & Fauzi, A. M. (2019). Hegemoni Kyai Terhadap Santri. *Paradigma*.
- Dewi, M., & Hakim, F. N. R. (2025). Kekerasan Seksual di Pesantren: Analisis Power and Control dengan Pendekatan Relasi Gender. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 7374–7387.
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis*.
- Fanani, Z. (2022). Kekuasaan dan Otoritas Kepemimpinan Kyai dalam Proses Pengambilan Keputusan di Ponpes PPAI Daarussalam Wagir Malang. *Idarah (Jurnal Pendidikan dan Kependidikan)*, 5(2), 221–230. <https://doi.org/10.47766/idarrah.v5i2.72>
- Fanaqi, C. (2019). Kritik Terhadap Konstruksi Budaya Patriarki Melalui Karya Sastra. *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran Dan Penelitian*, 5(2).
- Foucault, M. (1975). *Dicipline and Punish: The Birth of the Prison*.
- Jauhari, N., & Thowaf, S. M. (2019). Kesetaraan Gender Di Pesantren Dalam Kajian Literatur. *Sejarah dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 13(2), 179. <https://doi.org/10.17977/um020v13i22019p179-188>
- Kiptiyah, S. M. (2017). Kyai Selebriti Dan Media Baru Thecelebrity'skyaiandnewmedia. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 19(3), 339–352.
- Masrur, M. (2017). Figur Kyai dan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren. *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 01(02), 272–282.
- Mustaqim, M. N., & Kurwidaria, F. (2025). Kritik Sosial Dalam Cerita Kyai Ageng Gribig Sebagai Upaya Penanaman Nilai Budaya Generasi Muda. *Sabdasastra : Jurnal Pendidikan Bahasa Jawa*, 9(1), 44. <https://doi.org/10.20961/sabpbj.v9i1.88186>
- Nurmayani, N., Zulchoiroh, S., Tussalmi, A., Yovani, S., & Perdiansyah, I. (2025). Kekerasan Seksual Berbasis Relasi Keagamaan: Studi Literatur Atas Kasus Kasus Di Pesantren Indonesia. *Jurnal Inovasi dan Kolaborasi Nusantara*, 06(2). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jikn>
- Pebriaisyah, F., Wilodati, W., & Komariah, S. (2022). Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren. *SOSIETAS*, 12(1), 1–14. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v12i1.48063>
- Rachmadhani, A. (2021). Otoritas Keagamaan Di Era Media Baru: Dakwah Gus Mus Di Media Sosial. *Penangkalan: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial*, 05(02), 150–169.
- Ramdan, A., & Usman, M. (2021). Pola Interaksi dan Komunikasi Kyai terhadap Santri di Pesantren Sirnarasa. *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah dan Tasawuf*, 3(1), 56–85. <https://doi.org/10.53401/iktsf.v3i1.37>
- Solihin, E., & Efendi, D. P. L. (2025). Eksistensi Pendidikan Pesantren: Kritik Modernisasi Pesantren. *Pesan-Trend: Jurnal Pesantren Dan Madrasah*, 4(1).
- Winarno, E. P., Islah, I., Giyoto, G., Suharto, T., & Muharom, F. (2025). Investigasi Pendidikan Islam terhadap Kuasa Otoritas Kekerasan Seksual di Pesantren. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 19(2), 958. <https://doi.org/10.35931/aq.v19i2.4795>